

Hibah Dana Partai Politik Barito Kuala Diserahkan



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/wp-content/uploads/2022/05/IMG20220527094956.jpg>

Bantuan hibah dana untuk partai politik diserahkan di Batola. Paling banyak didapatkan Partai Golkar. Sebelum dana hibah diserahkan, terlebih dahulu dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh pengurus parpol di aula Kesbangpol Batola, Jumat (27/5).

Sebanyak 8 parpol yang memiliki kursi di DPRD Batola menerima hibah dana itu. Jumlahnya beragam, tergantung jumlah pemilih yang didapatkan pada pemilihan legislatif 2019 lalu. Satu suara dihargai Rp4.267. Paling banyak didapatkan Partai Golkar, dengan jumlah suara 68.079. Partai berlambang pohon beringin itu mendapatkan bantuan Rp290.493.093. Berikutnya Partai Gerindra Rp61.862.966, PKS Rp60.365.249, PDI-P Rp56.618.823, PAN Rp55.227.286, PKB Rp52.343.289, Nasdem Rp29.280.154, dan PPP Rp26.050.035.

Pada kesempatan itu, Kesbangpol Batola juga mengadakan pembahasan jumlah bantuan untuk masa mendatang. Hampir semua parpol berharap jumlah hibah tersebut dinaikkan. Minimal sama dengan daerah lainnya di Kalsel yang paling kecil di angka Rp7 ribu. "Hari ini dilakukan penandatanganan hibah, serta dengar pendapat terkait jumlah bantuan per suara," ujar Kepala Badan Kesbangpol Batola, Ardiansyah.

Terkait usulan kenaikan ini, pihaknya hanya memfasilitasi untuk mendengar langsung pendapat dari partai penerima hibah. Sekadar diketahui, bantuan dana hibah parpol Batola masih tertinggal jika dibandingkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sudah Rp7 ribu. "Dibandingkan kabupaten lainnya, Batola terendah. Padahal di tahun 2023-2024 merupakan tahun politik. Dana sangat diperlukan parpol," ungkap Ardiansyah. Dana hibah itu tentu diharapkan untuk pembinaan kader maupun

pembelajaran politik bagi masyarakat. Supaya menjadikan pemilu yang lebih berkualitas.

Ardiansyah menambahkan usulan kenaikan bantuan ini akan disampaikan ke tim anggaran. Tentunya dengan catatan kalau anggaran mampu untuk itu. “Bantuan tahun ini tetap Rp4.267. Kenaikan akan diberlakukan di tahun 2023 bila disetujui,” ujarnya.

Ketua pelaksana penandatanganan bantuan hibah ini, Abdul Gani Majedi menambahkan bahwa pemberian bantuan sudah diatur dalam undang-undang. NPHD ditandatangani setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi lengkap administrasi oleh tim yang beranggotakan BPKAD, KPU, dan lainnya. Dilanjutkan dengan pembetulan dan penyempurnaan berkas yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Gani menambahkan bantuan yang diserahkan tahun ini berjumlah Rp632.187.390. “Yang menerima bantuan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, dan telah menerima hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama,” ungkapnya.

Gani mengatakan bantuan ini diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat, serta digunakan untuk operasional partai politik. “Kegiatan pendidikan politik yang diperbolehkan seperti seminar, lokakarya, dialog interaktif, dan lainnya,” jelasnya.

Ketua DPC Partai PPP, Bahrul Ilmi berharap bantuan ini bisa bermanfaat. “Kami berharap administrasi berjalan dengan baik. Supaya hubungan anggota partai dari DPC, ranting, dan anak ranting berjalan baik. Sesuai visi-misi partai,” harapnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Delapan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Batola terima bantuan keuangan berupa hibah dari Pemerintah Daerah Batola, Jumat (27/5/2022). Total ada Rp.632.187.390 bantuan yang diserahkan tahun ini, dengan nominal yang berbeda-beda berdasarkan hasil suara yang didapat pada pemilihan legislatif 2019 lalu.

Satu suara dinilai Rp.4.267. Untuk suara paling banyak didapatkan Partai Golkar, dengan jumlah suara 68.079, mendapatkan bantuan Rp. 290.493.093, disusul Partai Gerindra Rp. 61.862.966. Kemudian Partai PKS Rp. 60.365.249, Partai PDI-P Rp. 56.618.823, Partai PAN Rp. 55.227.286, Partai PKB Rp 52.343.289, Partai Nasdem Rp. 29.280.154 dan Partai PPP Rp. 26.050.035.

Dana hibah sendiri diserahkan setelah prosesi penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh pengurus Parpol di Aula Kesbangpol Batola.

Disampaikan Abdul Gani Majedi, Ketua Pelaksana, bantuan ini sesuai undang-undang, NPHD sendiri baru bisa dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi lengkap administrasi oleh tim verifikasi yang beranggotakan BPKAD, KPU, dan lainnya. Kemudian Dilanjutkan dengan pembetulan dan penyempurnaan berkas

yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku. "Yang menerima bantuan ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama," ungkap Gani.

Ia pun mengatakan, bantuan ini diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Serta digunakan untuk operasional partai politik. Sementara itu, dalam kesempatan ini pula disuarakan oleh pengurus Parpol untuk kenaikan bantuan serupa, minimal sama dengan kabupaten lain di Kalsel.

Menanggapi hal ini, Ardiyansyah, Kepala Kesbangpol Batola akan coba memfasilitasi karena adanya pendapat dari partai penerima. "Hampir semua parpol penerima hibah, menyepakati untuk kenaikan jumlah bantuan per suara. Sekitar Rp7 per suara, dari Rp. 4.267," ujarnya.

Ia pun menambahkan, dibandingkan kabupaten lainnya, Batola memang penerima terendah. Padahal di tahun 2023-2024 yang merupakan tahun politik, dana sangat diperlukan parpol. Terutama untuk pembinaan kader maupun pembelajaran politik bagi masyarakat. Sehingga nantinya menjadi Pemilu yang berkualitas. "Rencana kenaikan bantuan ini akan disampaikan ke tim anggaran. Tentunya dengan catatan kalau anggaran mampu untuk itu, Kenaikan akan diberlakukan di tahun 2023 jika disetujui," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/28/05/2022/hibah-dana-parpol-batola-diserahkan/>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/27/tandatangani-nphd-delapan-parpol-di-batola-terima-hibah-bantuan-rp-632-juta>.

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk

menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:

a. *Huruf a*) pemerintah pusat

- 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

b. *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. *Huruf c*) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d. *Huruf d*) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e. *Huruf e*) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari

kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka (3)* partai politik dan/atau

- 4) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf d)* memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf e)* memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.